



## Bab 5

# Berpihak ke Rakyat atau Mati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Rakyatkan Ekonomi Kerakyatan



**EDYANUS Herman Halim, seorang pengamat ekonomi yang juga dosen di Universitas Riau menilai bahwa ekonomi kerakyatan yang digembar-gemborkan, belum jelas juntrungannya. Ekonomi kerakyatan yang disebutnya sebagai ekonomi papan bawah ini belum lagi berhasil dijalankan.**

\*\*\*

**EDYANUS** Herman Halim sebagai salah seorang pengamat ekonomi maupun anggota Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Kerakyatan melihat 'ekonomi papan bawah' ini masih terus berdetak dalam kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini. Hal dapat dilihat dalam kenyataan sehari-hari dimana masih terlihat adanya pasar-



pasar Ramadhan, dan di pasar-pasar tradisional transaksi masih terus berjalan. Di sisi lain pembangunan infrastruktur juga terus berjalan. Hal ini merupakan indikasi bahwa ekonomi masih terus berdetak dan bergerak.

Persoalannya, yang kita hadapi saat ini adalah kebutuhan infrastruktur seperti listrik, telepon dan lain sebagainya itu belum dapat dijadikan faktor penunjang yang dapat diandalkan. Hal ini terjadi karena diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,” katanya.

Dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah dimana uang yang beredar di daerah akan lebih banyak dibanding masa-masa sebelumnya. Kondisi ini diharapkan menjadi stimulus di daerah yang bersangkutan untuk menggairah sektor ekonomi.

Kembali ke persoalan ekonomi kerakyatan yang dinilainya belum lagi jalan, Edyanus mengatakan salah satu indikasinya adalah belum adanya data yang dimiliki oleh sekretaris daerah tentang dana dari APBD yang akan disalurkan kepada pengusaha kecil sebagai salah satu bentuk implementasi ekonomi kerakyatan.

Oleh sebab itulah, hal ini menjadi tantangan bagi Gubernur Saleh Djasit, SH untuk masa-masa yang akan datang. “Ekonomi kerakyatan jangan hanya sebatas retorika saja,” katanya.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Saat ditanya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan, Edyanus memberikan beberapa langkah. Pertama pemerintah harus memiliki mekanisme pemberian modal serta harus pula diikuti dengan pembinaan operasionalnya.

Jangan menggunakan sistem proyek yang hanya akan menimbulkan pengusaha-pengusaha karbitan. Mereka hanya ramai bermunculan karena akan diturunkan dana bantuan. Kalau dana sudah tidak ada merekapun menghilang,” katanya pula.

Bila perlu, lanjutnya, bentuk badan tersendiri yang mengelola ekonomi kerakyatan. Juga perlu dilakukan pembinaan institusional dan pembinaan sumberdaya manusianya (SDM).

“Cari titik-titik yang memang menarik minat para pengusaha kecil itu sehingga mereka tekun mengerjakannya. Setelah itu bantu mengembangkan usahanya sehingga dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bangun etos kerja mereka dengan kedisiplinan.”

Selama ini menurut Edyanus lagi, masalah ini diserahkan pengelolaannya kepada dinas-dinas yang bersangkutan tanpa adanya pengembangan permasalahan, jaringan ataupun teknologi. Seharusnya, dengan adanya otonomi daerah dimana daerah mendapat kewenangan yang sangat luas untuk mengembangkan dirinya, pemerintah daerah



membuat kebijakan yang dapat menguntungkan pengusaha kecil.

Sedangkan tentang program Jaring Pengaman Sosial menurut, Edyanus bukanlah solusi terbaik karena JPS bukan dirancang untuk mengatasi krisis jangka panjang. (kim)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengunutkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of Universitas of Riau

<https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Setahun Rusli Zainal Menjadi Gubernur Angka Kemiskinan di Riau Malah Bertambah



**Setahun Rusli Zainal menjadi Gubernur Riau, dinilai tidak memiliki target yang jelas. Program K2I belum jelas implementasinya.**

\*\*\*

Tidak seperti halnya dengan kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono yang disingkat SBY menargetkan 100 hari bukti kerjanya. Gubernur Riau H M Rusli Zainal SE yang cuma memimpin provinsi tidak ada target yang jelas dalam masa setahunnya. Buktinya program K2I-nya dalam pengentasan (Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur) dalam setahun ini, isu sentral tersebut belum jelas implementasinya. Alhasil, tingkat pertumbuhan ekonomi di Riau turun dari tahun sebelumnya sehingga jumlah masyarakat Riau yang miskin juga cenderung bertambah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Edyanus Herman Halim, pengamat ekonomi Riau yang berasal dari UNRI menilai masih banyak tugas-tugas Gubri Rusli Zainal yang harus dikerjakan. Isu sentral selama ini yang didengungkan seperti program K2I-nya belum ada implementasi yang jelas. Justeru ia melihat belum ada kerangka yang jelas untuk program itu.

Salah satu buktinya dari aspek implementasi terlihat seperti ada beberapa Kepala Dinas yang dikarbitkan. Sebelumnya banyak orang menilai yang dikarbitkan tersebut merupakan orang-orang profesional, tapi nyatanya perlu dipertanyakan. Pada Desember 2004 ini baru dinyatakan 63 persen yang terealisasi. "Kita tidak melihat sentuhan-sentuhan yang berarti dari fungsi pemerintahan sebagai pengstimulus perbaikan ekonomi masyarakat," papar Edyanus.

Berdasarkan data yang dihimpun pengamat ekonomi UNRI tersebut, pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi tanpa migas mencapai 7,58 persen pada kuartal ke empat. Dibandingkan dengan kuartal keempat tahun ini, pertumbuhan ekonomi tanpa migas baru mencapai 6,49 persen. Dari angka tersebut jelas peran pemerintah pada sektor ekonomi masih relatif kecil. Sehingga perbaikan-perbaikan ekonomi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masih perlu dipertanyakan.

Dari berbagai sector yang dilaksanakan, yang relatif mengalami penurunan adalah sector





pertanian. Bila pada kuartal ke empat tahun 2003 pertumbuhan sebesar 5,57 persen, lain halnya ditahun 2004 ini menurun menjadi 4,4 persen. Itu berarti gairah di sektor pertanian melemah, padahal peran kontribusi sector pertanian sangatlah besar. Apalagi didukung masyarakat yang bekerja untuk sector itu sangat dominan. "Saya menilai belum ada terjemahan yang konstruktif dari dinas-dinas yang mendukung program K2I tersebut," terang pengamat ekonomi UNRI itu.

Selain dari itu ada satu hal yang sangat diprihatinkannya, yaitu menurut Gubri Rusli Zainal yang menyatakan akan "Run" ditahun 2005. "Kalau run-nya saja ditahun 2005, jadi ditahun 2004 apa yang bisa diambil hasilnya? SBY saja memimpin negara cuma mentargetkan 100 hari kerja untuk membuktikannya," ujar Edyanus, heran.

Dari data yang ada, Edyanus menilai baru dari sektor perindustrian dan perdagangan yang terjadi peningkatan. Buktinya pada kuartal keempat tahun 2003 lalu sebesar 9,55 persen. Pada tahun 2004 terjadi peningkatan menjadi 10,13 persen.

Menurut pandangan pengamat ekonomi itu, kuantitas orang miskin di Riau yang selalu disebut-sebut selalu segitu-segitu saja. Meskipun tidak ada angka yang pasti diketahuinya, yang jelas jumlah orang miskin, khususnya petani diprediksikannya semakin bertambah saja. Penyebabnya tidak lain karena tidak fokusnya dalam implementasi program-



program pembangunan. “Seharusnya terjemahan K2I itu harus lebih konkrit dalam bentuk program dan proyek,” jelas Edyanus.

Program-program tersebut sangat penting karena antara satu dan yang lainnya saling terkait. Misalnya saja program pendidikan masyarakat yang perlu diperhatikan, baik yang sedang bersekolah, pra sekolah, sedang bekerja maupun tidak, baik di sektor pemerintah maupun swasta seharusnya dikemas dalam satu program pendidikan yang diarahkan untuk mencerdaskan anak jati Riau. “Jadi jangan hanya mengharapkan kompetitif ekspentif dari sumberdaya alam saja, itu tidak langgeng,” ujar Edyanus.

Menyinggung Dewan Pakar Daerah yang selama masa Gubri Saleh Djasit dibentuk tetapi tidak terlihat di masa Rusli Zainal, menurut Edyanus itu berfungsi tidak hanya sebatas evaluasi. Tetapi juga sebagai *warning* untuk diskasi yang konstruktif dengan pokok-pokok persoalan sesuai dengan harapan yang ingin dikejar dan ingin dicapai.

Meskipun dibuat diskusi-diskusi yang intensif, tapi gubernur tetap saja punya standar yang baku untuk mengambil keputusan. Itu hanya dianggap sebagai masukan dan untuk pembanding dari masukan-masukan yang lain. Sehingga masukan itu tidak hanya berasal dari juru bisik. “Jadi ada *check and balance*-nya dari pemikiran-pemikiran yang masuk kepada gubernur,” jelas pengamat ekonomi



yang juga merupakan salah seorang pembantu dekan Fekon UNRI tersebut.

Berhubung tugas yang diemban Rusli Zainal merupakan kelanjutan dari tugas gubernur sebelumnya, Edyanus menilai tidak ada *kesinambungan* yang jelas yang terlihat. Padahal visi dan misi gubernur sebelumnya yang berupa lima pilar pembangunan sangat perlu diimplementasikan saat ini. Karena program K2I itupun merupakan implementasi dari jabanran lima pilar juga. "Lima pilar itu tidak terlepas dari K2I, seperti peningkatan SDM, peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi itu sama juga dengan pengentasan kemiskinan juga," papar Edyanus.

Seharusnya Rusli Zainal melanjutkan program-program dari Saleh Djasit yang lebih terfokus pada *vocal point*. Misalnya saja *vocal point* masa Saleh Djasit seperti untuk IMTAG (iman dan taqwa) ia membangun kembali Mesjid Agung Annur yang megah, untuk peningkatan SDM ia membangun Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Daerah yang lengkap.

Bolehlah itu disebut proyek mercusuar, sebaiknya Rusli Zainal meneruskan dengan implementasi pada pengembangan SDM. "Bila kita lihat dari data ekonomi, pertumbuhan ekonomi Riau dari aspek pemerintahan "nothing touch" atau tidak ada sentuhan yang baik," papar Edyanus Herman Halim mengakhiri. (ridwan)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Rakyat Masih Miskin



Laju pertumbuhan ekonomi Riau tahun ini berkisar 8,13 persen. Ini melebihi rata-rata nasional yang cuma 6,5 persen. Namun sayang, pertumbuhan ekonominya hanya dinikmati kaum elit saja.

\*\*\*

**DESMINAR** berdecak kagum. Dirinya tak menyangka perkembangan Riau begitu pesat. Padahal, kota Pekanbaru dan beberapa kabupaten lainnya di Riau baru dua tahun ditinggalkannya. Ia tak habis-habisnya menggelengkan kepala tanda takjub. "Riau sekarang sudah berbeda dengan Riau dahulu," begitu ujarnya takjub.

Menurut cerita-cerita yang didengar wanita pedagang bahan pakaian ini dari teman-temannya,





pertumbuhan ekonomi Riau telah melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional. Makanya, ia kembali ke Riau untuk membuktikan dan kembali mencoba peruntungan.

Seminar tampaknya tidak sendirian. Di belakangnya juga menyusul para pengusaha dari latar belakang beragam. "Kami ingin mengembangkan usaha ke negeri lancang kuning ini," kata Abbas Munarwan di lobby Hotel Pangeran Pekanbaru beberapa waktu lalu pada Azam.

Pekanbaru dan beberapa kabupaten lainnya di Riau merupakan tempat yang cocok untuk pengembangan usaha industri. Kata Abbas, investasi swasta lebih banyak mendorong pertumbuhan ekonomi Riau. Benarkah?

Rektor Ekonomi UNRI Edyanus Herman Halim menilai peningkatan laju ekonomi di Riau didorong oleh banyaknya usaha besar yang beroperasi di Riau, terutama perusahaan perkebunan dan pertambangan batubara yang dapat mencapai 34,51 persen. Sektor bangunan 8,98 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 11,8 persen dan yang paling pesat pertumbuhannya adalah sektor keuangan, persewaan, bangunan dan jasa perusahaan yang dapat mencapai 16,1 persen.

Meskipun demikian, kata Edyanus pertumbuhan itu tidak banyak menyentuh masyarakat. Ini menjadi tugas pemerintah bagaimana laju pertumbuhan



tersebut dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Selama ini kita melihat kue ekonomi itu banyak dinikmati oleh kalangan elit saja, terutama perusahaan kayu, perkebunan, dan pertambangan. Sementara masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah begitu saja hidupnya tanpa perubahan berarti,” jelasnya.

Menurut Edyanus, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah. Yang sangat krusial sekali yakni pembangunan infrastruktur pedesaan di tingkat kecamatan terutama transportasi, listrik dan air bersih. Tiga ini musti menjadi fokus.

Baru setelah itu pemerintah mendorong tumbuhnya industri hilir melalui pengembangan kawasan industri yang berbasis masyarakat, maka dengan sendirinya produk mentah yang dijual masyarakat mendapat pasar yang terjamin. Industri hilir ini diharapkan juga dapat menampung tenaga kerja sehingga pengangguran dapat berkurang.

“Sejauh ini kita lihat upaya pemerintah ke arah sana belum berjalan dengan baik, dan wajar kita iri pada Sumatera Barat. Jalan-jalannya bagus sampai ke pedesaan. Saya tak habis pikir, mengapa pemerintah kita baik di daerah maupun propinsi tidak memperhatikan aspek transportasi. Sudah lima tahun otonomi daerah, kita belum melihat peningkatan berarti pada ruas jalan utama, apalagi ruas-ruas jalan di lintas kecamatan dan pedesaan. Pemda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



cuma banyak membangun gedung saja,” terangnya.  
(Iza)

Repository University of Riau

<https://repository.unri.ac.id>

© Hak cipta milik Universitas Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Penyimpangan APBD Kemungkinan Lebih Besar



**PEKANBARU**—Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyimpangan APBD Riau sebesar Rp33,95 miliar mendapatkan tanggapan “tidak percaya” dari pengamat ekomoni Edyanus Herman Halim SE MS.

Edy bukan tak percaya adanya penyimpangan. Ia justru tak percaya kalau besarnya penyimpangan hanya sebanyak itu. Kepada *Pekanbaru Pos*, Senin (2/7) kemarin mengatakan, bisa jadi jumlah penyimpangan lebih besar dari hasil temuan BPK.

Jika dilihat dari APBD yang jumlahnya Rp 3,7 triliun, angka Rp 33,95 miliar masih terbilang kecil. Apalagi ini baru pada enam satuan kerja. Saya melihat, kemungkinan jumlah penyimpangan bisa saja lebih besar lagi,” ujar Edy.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Menurut Edy, hal ini terjadi karena banyak program pembangunan yang hingga saat ini masih belum selesai sesuai jadwal. Bila melihat dari aspek administratif atau pelaksanaan pembangunan, pundi-pundi penyimpangan APBD kemungkinan akan semakin bertambah.

Untuk itu Edy mengimbau agar segala bentuk penyimpangan ini dapat segera ditindaklanjuti kebenarannya untuk segera diperbaiki bila benar penyimpangan tersebut ada. Untuk itulah diperlukan adanya partisipatif aktif, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

“Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki bersama-sama. Karena penyimpangan APBD akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya para investor dari pihak-pihak swasta,” ujar Edy.

Karena, menurut Edy, APBD dalam bentuk biaya modal adalah investasi pemerintah yang akan turut mempengaruhi perekonomian daerah dan pemerataan dinamika ekonomi masyarakat di daerah. Jika ada penyimpangan dalam implementasi APBD, jelas akan mempengaruhi dinamika ekonomi masyarakat.

“Karena investasi pemerintah adalah salah satu variabel pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Bila terjadi penyimpangan tentu nanti akan ada gangguan, khususnya pada tingkat *trust* (kepercayaan, *red*) pihak swasta selaku investor. Padahal pihak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

swasta memegang peranan yang penting karena biasanya pemerintah hanya berinvestasi pada sektor-sektor yang kurang dimintai oleh swasta,” ujar Edy kembali.

Menurut Edy, untuk mengurangi penyimpangan dana APBD, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan para *stake holders*, yaitu harus dilakukan peningkatan pengawasan internal dan aspek perencanaan harus lebih mengarah pada yang lebih realistis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah.

Edy menambahkan, selama ini sering terjadi kesalahan paradigma berpikir masyarakat untuk mengartikan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Bila pembangunan infrastruktur seperti perkantoran, gedung, jalan raya, jembatan berdiri megah, maka akan dianggap pembangunan sudah meningkat. Padahal, ujar Edy, ini bukan keberhasilan.

“Kalau baru pada tahap pembangunan infrastruktur, itu belum berhasil. Tapi bila masyarakat menjadi lebih baik sejak adanya infrastruktur tersebut, itu baru yang namanya keberhasilan. Jangan sampai salah menganalisa sebuah keberhasilan dalam konteks pembangunan ekonomi. Kenyataan saat ini, indikator keberhasilan pembangunan kita masih sangat minim sekali, karena masyarakat kelas bawah masih banyak yang belum berubah kesejahteraannya,” tegas Edy.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Dari Diskusi FKPMR **APBD Riau Tidak Berpihak ke Publik**

**PEKANBARU**-Sebagian besar pengalokasian APBD Riau 2006 dinilai tidak berpihak ke masyarakat (publik) atau tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas, melainkan hanya untuk dinikmati segelintir orang dan kelompok tertentu.

Hal itu mengemuka dalam diskusi “Mengkritisi APBD Riau 2006” yang ditaja Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) di Sekretariat FKPMR Jl Kembang Sari Komplek, Gobah, Pekanbaru, Rabu (7/6). Pada diskusi dibuka Ketua Umum FKPMR Kol (Purn) H Abbas Jamil dan dimoderatori Nurchayadi itu, tampak hadir Ketua Harian FKPMR Al Azhar, Sekretaris Levna Ervan, Mardianto Manan, Syahrial, dosen Unri Edyanus Herman Halim, Ali Yusri, Alimin Siregar, M Ikhsan, staf Bappeda Riau





serta undangan lainnya.

Menurut Edyanus, program pertanian hanya kebohongan belaka. Sebab anggarannya hanya Rp15 miliar, itu pun tidak dijelaskan untuk apa saja dana tersebut, apakah untuk membeli peralatan atau yang lainnya. "Belanja alat-alat kantor Pemprov lebih besar dari anggaran pertanian. Jadi tepatnya APBD itu pro aparatur, bukan pro pertanian," katanya.

Kemudian, pembangunan kantor-kantor baru dirasa kurang efektif. Sebab ruang-ruang kantor saat ini di dinas-dinas masih banyak yang kosong.

Selain itu, dana ormas sekitar Rp 200 miliar juga tidak jelas kriteria organisasi seperti apa yang mendapatkannya. "Kalau tidak jelas kriterianya, akan jadi bumerang. Karena politik anggaran itu untuk menstimulus pembangunan. Kalau tidak jelas justru akan menjadi anggaran politis," tuturnya dosen Fekon Unri yang juga pengurus FKPMR.

Edyanus juga belum melihat perkembangan kebun rakyat K2I yang digembar-gemborkan Pemprov. "Sudan dua tahun, tetapi kebun K2I ini tidak jelas ke mana arahnya dan sejauh mana pelaksanaannya. Padahal sudah dianggarkan," ujarnya. (the)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Perlu Peninjauan Ulang Proyek Multi Years



Meskipun proyek *Multi Years* (MY) yang bernilai Rp 1,738 trilion sudah disahkan anggota DPRD Riau periode 1999-2004, namun sudah menjadi tugas bagi anggota dewan yang baru dalam implementasi tugasnya untuk melakukan pengawasan dan kontrol. Anggota dewan periode 2004-2009 bisa saja membatalkan proyek tersebut jika di dalam pelaksanaannya ditemui banyak unsur penyimpangan.

\*\*\*

Apa saja yang perlu diperhatikan dalam proyek jalan dan jembatan di Riau itu, berikut petikan wawancara *Merdeka* dengan Edyanus Herman Halim, SE, MS, pengamat ekonomi Riau.



Apa pendapat Anda tentang proyek Multi Years?

Pertama sekali saya tidak ingin terjebak siapakah yang mengesahkan, apakah DPRD lama atau baru atau juga terkesan mendadak atau tidak. Karena itu bersifat politis sekali. Tetapi, perspektif orientasi dan pendekatannya harus dilaksanakan berdasarkan kinerja berbasis kepada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

*Mengapa bukan anggota DPRD yang baru saja melakukan penilaian mendalam dan mengesahkan proyek itu ?*

Sekali lagi, saya tidak memandang anggota dewan yang mana yang sebaiknya mengesahkan proyek itu, meskipun setengah jam masa tugasnya akan berakhir. Tapi, yang perlu sekali bagi anggota dewan yang baru boleh saja merombak atau membatalkan proyek yang didanai APBD tersebut jika terjadi penyimpangan. Karena itu merupakan hak budgetnya DPRD. Yang perlu diperhatikan, apakah ini proyek butuh bagi masyarakat banyak atau tidak, optimal atau tidak dan juga benar atau tidak.

*Apa saja ukuran untuk menilai pelaksanaan proyek tersebut?*

Yang perlu dikaji untuk menilainya ada tiga faktor; *pertama*, apakah *significansi* proyek tersebut bersentuhan dengan kepentingan pemberdayaan masyarakat. Juga apakah ada aspek mobilisasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

masyarakat, barang dan jasa, keterbukaan isolasi daerah dan kebutuhan-kebutuhan proses pembangunan lanjutan dengan adanya bangunan itu. *Kedua*, apakah setiap rupiah yang dianggarkan dalam proyek itu betul-betul optimal, artinya tidak ada *mark-up* biaya. *Ketiga*, dana yang dialokasikan untuk proyek itu apakah sudah *efisien* atau tidak, *accountable* atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi sekali lagi, apakah *multiplayer effect* yang akan ditimbulkan oleh pembangunan itu bermanfaat pada masyarakat banyak dan efisien.

*Bagaimana kalau terjadi penyimpangan dari ukuran penilaian tersebut?*

Kalau terjadi penyimpangan, baik itu *mark-up* biaya atau bestek proyek tersebut, perlu segera ditinjau ulang oleh anggota dewan sekarang. Dalam implementasinya, DPRD harus melakukan kontrol dan pengawasan supaya jangan sampai ada penciptaan bestek dan segala macamnya. Kalau itu terjadi, berarti ada hal-hal yang mencurigakan, pihak legislatif harus *sikat* pelaku penyelewengan itu. Mestinya itu yang harus dievaluasi selalu. Hal ini sangat berguna agar masyarakat dapat mendapatkan *benefit-benefit* dari setiap rupiah dari dana APBD itu.

*Kalau begitu Anda setuju dengan pelaksanaan proyek tersebut?*





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Saya setuju sekali kalau jalan-jalan di Riau ini diperbaiki, apakah melalui multi years atau apa saja namanya, asal jangan cuma membangun gedung-gedung pemerintah. Sebab, ini akan membuka isolasi daerah yang selama ini tertutup. Cuma saja perlu kajian secara professional oleh ahli-ahli khusus di DPRD. Kita perlu mengukur proyek tersebut dari urgensi dan prioritas program-program pembangunan di Riau. Seperti yang pernah disebut gubernur K2I (kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur).

*Sudah mendesakah proyek tersebut dilakukan?*

Sebagai contoh, di Sumatera Barat saja bisa kita lihat manfaat dari terbuka ruas jalan yang bermutu baik itu. *Multi player effect*-nya bagi masyarakat sangat besar. Jadi kita tidak perlu mengobrak-abrik itu, karena bisa menjadi tidak berbasis kerakyatan. Sedangkan pembangunan itu berbasis kerakyatan, bukan berbasis DPRD baru dan lama.

*Di luar konteks ekonomi, apakah proyek ini akan membuka peluang KKN?*

Saya belum sejauh itu menilainya, tapi itulah yang menjadi tugas anggota dewan baru. Apabila ada indikasi KKN-nya, silahkan sikat yang berbau KKN itu. Dalam arti kata penyelewengannya saja.

*Bagaimana pula kalau anggota dewan sendiri yang terlibat KKN, karena ada isu yang mengatakan anggota dewan bakal dapat fee dari proyek itu ?*

Kalau ada dewan yang melanggar Keppres





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor 80 tahun 2003, tentang pengadaan barang dan jasa itu, itulah yang kita kejar. Anggota dewan baru jangan terjebak memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.

*Apa seharusnya yang dilakukan anggota dewan yang baru?*

Seharusnya anggota dewan yang baru yang canggih, didominasi anggota berpendidikan sarjana itu meneliti proyek itu. Apakah proyek itu benar atau tidak, bermanfaat atau tidak, pelaksanaannya benar atau tidak, perlu evaluasi. Kalau tidak sesuai prosedur, angkat persoalannya. Mari kita fungsikan jaksa dan polisi, kalau tidak berfungsi juga, termasuk DPRD yang merekomendasikan, konstituenlah yang akan membenarkan itu nantinya.

Diharapkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, mahasiswa termasuk juga pers untuk memantau dan mengawalnya. (Ridwan)

© Hak cipta milik Universitas Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Birokrat Belum Terdidik Sebagai Pelayan Masyarakat



**PENGAMAT** ekonomi yang juga Dosen Fekon Universitas Riau, Edyanus Herman Halim SE, MS, berpendapat pencabutan subsidi BBM terpaksa dilakukan pemerintah karena desakan kondisi perekonomian. Subsidi BBM menyebabkan harga BBM dalam negeri lebih murah dibandingkan dengan luar negeri. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyeludupan BBM ke luar negeri.

Baru-baru ini terungkap kasus pencurian minyak secara besar-besaran yang melibatkan pejabat dan aparat negara. Jelas ini sangat merugikan negara dan akan menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM di dalam negeri. "Subsidi BBM selama ini hanya dinikmati kalangan berada," katanya. Justeru itu, pengalihan subsidi berupa pemberian kompensasi BBM kepada rakyat miskin perlu



1. Dianggap melanggar Undang-Undang Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dilakukan. Sayangnya lagi, selama ini aparat negara juga tidak sanggup mencegah kejadian itu bahkan yang lebih fatalnya, aparat malah ikut bermain untuk penyeludupan.

Eddy anus tak menampik kenaikan BBM berdampak pada kenaikan harga barang. “Yang penting, kalangan usaha jangan malah menanggung di air keruh,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan subsidi BBM selama ini telah membebani negara mencapai Rp 128 trilyun. Pengalihan subsidi BBM kepada orang miskin memiliki dasar yang sangat kuat. Hanya saja ada dampak-dampak yang akan muncul akibat pengalihan subsidi itu. Misalnya dari pihak-pihak selama ini menikmati subsidi yang seharusnya bisa diperuntukan bagi orang miskin. Kemudian para spekulan yang sangat diuntungkan dengan adanya disparitas harga sudah barang tentu ingin mempertahankan keadaan.

Kompensasi BBM hanya merupakan istilah dialihkannya subsidi BBM kepada orang miskin, karena ada akibat-akibat (*cost*) yang akan timbul dari proses kenaikan itu terhadap masyarakat miskin. Kompensasi itu sudah merupakan keharusan. Namun permasalahannya, selama ini Indonesia gagal membantu orang miskin karena ada beberapa faktor. Pertama, manajemen kependudukan di Indonesia tidak baik. Tidak jarang penduduk



memiliki KTP ganda, dan bahkan pejabat pun disinyalir melakukan hal itu. Akibatnya, data tentang kependudukan tidak pernah akurat. Siapa yang miskin tidak jelas, bahkan dalam proses penentuan siapa sebenarnya yang miskin, tak jarang terjadi manipulasi hingga sasaran untuk mengentaskan kemiskinan menjadi rancu dan kinerja program tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, mental aparatatur birokrasi tidak terdidik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga apapun program yang dilaksanakan untuk membantu orang miskin malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Tidak jarang kita jumpai program dibuat pemerintah dengan “meng-kambinghitamkan” kemiskinan.

Dengan berdalihkan orang miskin, maka timbullah proyek, yang pada dasarnya jauh dari upaya pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Keadaan tersebut sangat ironis dan menyakitkan masyarakat miskin. Mereka hanya menjadi jargon-jargon dalam pidato, tetapi mereka tetap saja sengsara menghadapi tekanan dan ketidakberpihakan pemerintah kepada mereka. (Harjono)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repositori Universitas Riau  
http://ojs.umsida.ac.id  
© Hak cipta milik Universitas Riau





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Modal Asing Gagal Serap Tenaga Kerja



**PEKANBARU** — Rekor investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Riau triwulan pertama mulai menunjukkan catatan “kusam”, pasalnya dari perseruaan total investasi baru yang akan masuk, hanya mampu membukukan dua proyek baru. Anehnya, kedua investasi bernilai 15,9 juta dolar AS itu, hanya mampu menyerap 90 tenaga kerja baru.

Dibandingkan total nilai investasi pada triwulan pertama, investasi baru juga sangat kecil, yakni 0,08 persen dari total investasi 1.952,1 juta dolar AS. Angka yang cukup miris adalah kecilnya realisasi investasi pada triwulan pertama 2007 yang hanya 392,5 juta dolar AS untuk tiga proyek atau 13,1 persen.

Dekan Ekonomi Universitas Riau, Edyanus Herman Halim mengatakan, peningkatan PMA



pada triwulan pertama tahun 2007 ini bukanlah kesuksesan, namun kegagalan Badan Promosi dan Investasi (BPI) Riau.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Pekanbaru, realisasi investasi PMA di Riau hanya pada dua proyek saja, itu pun didominasi oleh perluasan industri kertas yang mencapai USD 1,161.8 juta atau 59,51 persen dari total PMA sebesar 1,952 juta dolar AS di Riau. Jelas ini merupakan kegagalan BPI bukan kesuksesan,” tegas Edy kepada *Pekanbaru Pos*, Rabu (22/8).

Kegagalan ini dinilai karena jumlah PMA yang masuk tidak seimbang dengan jumlah proyek baru serta jumlah penyerapan tenaga kerja. Kalaupun jumlah tenaga kerja yang besar bisa terserap pada perluasan industri kertas, hal tersebut tidak bisa dinilai sebagai sebuah kesuksesan, karena perluasan industri kertas ditakutkan malah akan menambah kerusakan ekosistem sumber daya alam Riau.

“Perluasan industri kertas di Riau jauh hari jelas ditentang oleh aktivis lingkungan karena berpotensi memperparah kerusakan ekosistem Riau, namun malah ini yang paling besar PMA-nya. Perlu diketahui, pabrik kertas di Riau memang sudah lama me-*launching* keinginan untuk memperluas pabriknya tanpa perlu kerja keras dari BPI. Coba saja kita bayangkan, industri kertas diperluas, lain bahan bakunya darimana? Tentu dari hutan kita jugakan?” ujar Edy.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ini sinilah menurut Edy letak kegagalan BPI Riau, karena berarti persetujuan PMA oleh BPI tidak mempertimbangkan apa yang yang dikhawatirkan Riau yakni makin hancurnya hutan dan masa depan anak jati Riau karena ekologi bakal punah ranah.

Mungkin dalam masalah ini tidak ada koordinasi antara Dishut, Disperdag dan BPI sehingga para pemilik modal leluasa menanamkan uang untuk menguras kekayaan Riau ini," katanya.

Selanjutnya Edy menambahkan, PMA lain yang besar investasinya adalah industri kimia yang mencapai 715,9 juta dolar AS, tetapi ini juga lebih dominan dalam bentuk perluasan sebesar 702,9 juta dolar AS atau 98,18 persen. Kemudian PMA di sektor perkebunan sebesar 64,6 juta dolar AS merupakan alih status saja.

"Jika melihat dari data ini malah tambah jelas lagi kegagalan BPI. Meski sudah melancong ke luar negeri namun kemampuan BPI menjaring investor asing hanya pada bidang yang sebenarnya tanpa melancong pun para investor tersebut akan berinvestasi juga," tegas Edy. (mg2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Renstra Lebih Mirip Laporan Kertas Kerja



**PEKANBARU (RP)**-Rencana Strategis Pemerintahan Provinsi Riau 2004 dinilai Tim Asistensi Pansus Renstra DPRD Riau Edyanus Herman Halim SE MS bersifat mengawang-awang alias tidak membumi. Pasalnya dalam Renstra yang tebalnya ratusan halaman itu menurutnya lebih mirip laporan kertas kerja dinas instansi dan tidak memuat hal-hal substantif yang dapat diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan guna memberantas kemiskinan dan kebodohan.

Hal itu dikatakannya kepada *Riau-Pos* usai rapat lanjutan Pansus dengan Tim Penyusunan Renstra Pemprov Riau, Sabtu (24/1). "Analisis lingkungan internal yang dilakukan kurang tajam dan tidak mampu menggabungkan kekuatan dan kelemahan Riau yang ada saat ini. Apa yang disampaikan saya lihat baru sebatas laporan pekerjaan





dinas instansi sehingga termuat hal-hal yang tidak fokus” ujarnya.

Lebih jauh lagi dosen FE Unri ini mengatakan bahwa analisis internal dalam Renstra mirip sebuah “Laporan Pertanggungjawaban” yang dicomot-comot tetapi tercomot yang tidak substantif. Begitu juga, lanjutnya, dalam analisis eksternal hal yang sama juga terjadi.

Draft Renstra, lanjutnya, banyak yang tidak menyentuh aspek strategis yang bisa menggambarkan peluang dan ancaman pembangunan Riau di masa kini dan di masa datang. Menurutnya lagi analisis ekonomi baru sebatas memetakan pertumbuhan yang terjadi dan memproyeksikannya dengan asumsi-asumsi linier semata. Tidak menggambarkan, lanjutnya, bagaimana ketimpangan antar wilayah pada sektor-sektor sekunder dan tersier sebagai bentuk dan dualisme ekonomi yang terjadi di Riau saat ini.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Renstra juga tidak memuat standar kinerja secara baku dan objektif sehingga kinerja Pemprov jadi sulit diukur pada akhir masa jabatan. “Akibatnya baik DPRD maupun eksekutif tidak memiliki dasar ukuran yang jelas bagi keberhasilan pelaksanaan program di akhir masa jabatannya,” ujar mahasiswa program doktor Universiti Teknologi Malaysia ini. Selain itu, lanjutnya, paparan tim penyusun Renstra Pemprov tidak menggambarkan bahwa berapa jumlah penduduk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



misal yang bisa berkurang setiap tahunnya dengan berbagai program yang ada.

Di bagian lain ia juga menyorot bahwa draft Renstra tidak menyinggung soal Provinsi Kepri yang sudah menjadi wilayah administratif yang terpisah dan Provinsi Riau. Menurut Edyanus harusnya ada antisipasi pasca terpisahnya administratif kedua wilayah tersebut.

“Harus ada kalkulasi apa keuntungan dan kerugian dan apa antisipasi dalam kaitannya dengan penerimaan dan pembiayaan daerah,” ujarnya. Menurutnya hal-hal itu tidak tergambar dengan Renstra yang disusuri oleh tim Pemprov Riau tersebut. (fiz)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Hanya Dua BUMD Aktif Beri Kontribusi



SEPANJANG tiga tahun terakhir ini, berdasarkan data Dispenda Riau, hanya dua BUMD yang aktif memberikan kontribusi untuk PAD Riau.

Perusahaan yang memberikan kontribusinya 3 tahun terakhir yaitu, PT Bank Riau, tahun 2004 sebesar Rp36,565 miliar, tahun 2005 (Rp24,135 miliar) dan tahun 2006 (Rp44,773 miliar).

PT PER memberikan kontribusi hanya pada tahun 2005 (Rp 1,009 miliar) dan 2006 (Rp1,016 miliar) saja.

Di luar kedua perusahaan itu, seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) hanya menyumbang ke PAD tahun 2006 sebesar Rp 55 juta, sedangkan PT Sarana Penjaminan Riau (SPR), bagian dari labanya tidak dibagikan kepada Pemda dalam bentuk PAD tetapi dikembalikan pada perusahaan sebagai



tambahan modal, sehingga menambah jumlah saham pemerintah pada perusahaan tersebut.

BUMD yang tidak memberikan kontribusinya kepada PAD yaitu, PT Riau Petroleum.

Walaupun demikian, perusahaan daerah tidak hanya dilihat dari aspek profitabilitas (keuntungan) semata. Beberapa perusahaan harus diarahkan untuk dapat mengemban perbaikan kesejahteraan rakyat.

Di sini aspek benefit yang lebih diutamakan. Hanya saja harus diupayakan perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah.

Harus diakui juga, bahwa beberapa perusahaan daerah di Riau berkembang cukup baik. Patut disyukuri juga, PT Bank Riau sudah berkembang menjadi bank devisa. Itu artinya, berbagai pihak harus siap menjadikan bank Riau sebagai perusahaan daerah yang akan bermain pada wilayah kerja yang lebih luas.

Ke depan kita berharap Bank Riau menjadi penggerak perkembangan ekonomi Riau pada sektor-sektor ekonomi swasta besar dan sektor ekonomi yang moderen. (ibu)





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Pembentukan TKPK Terkesan Sia-sia Belaka



**PEMBENTUKAN** Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) hanya sia-sia bila tujuh Satker yang berada didalam tim belum bekerja dengan baik. Hal itu diungkapkan Pengamat Ekonomi Riau Edyanus Herman Halim kepada *Riau Pos* Kamis (3/5), di Pekanbaru.

Menurut dia, menekan jumlah kemiskinan sebesar dua persen bukanlah hal yang mudah. Dikarenakan jumlah masyarakat miskin di Pekanbaru juga sangat besar, mencapai angka 14.000 orang. Artinya, perlu kerja sama dan program dari masing-masing Satker untuk mewujudkan semua itu.

Dikatakan Edyanus, peningkatan perekonomian masyarakat saat ini memang cukup bagus yakni



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sekitar tujuh persen. Namun demikian, bila dilihat dari perkembangannya, masyarakat miskin juga bertambah. Kondisi ini harus diakui Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah. "Sebuah keinginan yang bagus dari wali kota. Tetapi perhatian lebih harus diperhatikan kepada jajaran TKPK tadi. Jangan sampai keinginan mulia tersebut tidak terlaksana," ujar dia.

Terkait dengan kinerja TKPK Edyanus menilai, masing-masing dinas terkesari belum berkoordinasi. Dikatakan Edyanus, sangat sulit bila TKPK ingin mendata masyarakat miskin tanpa adanya kerjasama. Sebaliknya bila sebuah kerjasama bisa tercipta Edyanus berkeyakinan, penurunan tingkat kemiskinan yang diharapkan pasti bisa diwujudkan.

Langkah yang perlu diambil dalam waktu dekat ini adalah membentuk koordinasi kuat tujuh Satker. Selain itu, lakukan juga pendataan bersama masyarakat. "Saya harap masyarakat bisa membantu hal itu. Sehingga tercipta keinginan masyarakat tadi," ungkapnya. (yls)

© Hak cipta milik Universitas Riau

